

## **PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DKI JAKARTA**

Oleh:  
**Yurianto<sup>1</sup>**  
**Akhmad Tantowi<sup>2</sup>**

*Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta<sup>1</sup>*  
*Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah<sup>2</sup>*

E-mail:

*yuribpsdm@gmail.com<sup>1</sup>*  
*atantowi75@gmail.com<sup>2</sup>*

### **ABSTRAK**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari pajak ini, tak terkecuali pemerintah daerah melalui berbagai reformasi perpajakan daerah. Tujuan dari reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Metode riset yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data Provinsi DKI Jakarta pada periode 1987-2019. Analisis regresi akan digunakan dan diolah dengan *software* SPSS. Hasil yang diperoleh dari riset ini adalah penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta selama periode 1987-2019. Kebijakan otonomi daerah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa kesinambungan penerimaan pajak daerah diperlukan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Penerimaan pajak daerah sebaiknya juga digunakan untuk mendanai proyek atau aktivitas yang produktif sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci:** Penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi, otonomi daerah, analisis regresi

## ABSTRACT

*Taxes are the main source of government revenue, both central and local governments. Various ways have been done to increase revenue from this tax, including local governments through various regional tax reforms. The purpose of tax reform is to increase regional revenues from the taxation sector which will be used for the prosperity of the people through economic growth and regional development. This study aims to investigate the effect of tax revenue on economic growth in DKI Jakarta Province. The research method used is a quantitative method with data from the DKI Jakarta Province in the 1987-2019 period. Regression analysis will be used and processed with SPSS software. The result obtained from this research is that local tax revenues have a positive and significant effect on economic growth in the DKI Jakarta Province during the period 1987-2019. Regional autonomy policies also affect the economic growth of DKI Jakarta. The implication of this finding is that the sustainability of local tax revenues is needed to increase economic growth in DKI Jakarta. Local tax revenues should also be used to fund productive projects or activities so as to accelerate economic growth.*

**Keywords:** *Tax revenue, economic growth, regional autonomy, regression analysis*

### A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran daerah dalam membiayai pengeluaran daerah, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak ini, tak terkecuali pemerintah daerah melalui berbagai reformasi perpajakan daerah. Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan. Penerimaan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah (Saragih, 2018).

Indikator keberhasilan reformasi birokrasi mencakup birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta memiliki kualitas pelayanan publik yang prima (KemenpanRB, 2020). Pemerintahan yang bersih akan menjamin optimalisasi penggunaan penerimaan pajak untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas dari birokrasi perpajakan, pemerintah daerah memiliki peluang yang luas untuk melakukannya seiring perkembangan teknologi informasi sangat pesat saat ini. Penggunaan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem dan fasilitas yang akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada publik. Kemudahan dapat diberikan kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbagai media berbasis teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyosialisasikan perpajakan bagi masyarakat luas untuk sadar dan taat pajak.

Keberhasilan reformasi perpajakan dapat diukur melalui peningkatan penerimaan pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Gebreegziabher (2018) dalam Saragih (2018) menyatakan

bahwa penerimaan pajak berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mdanat et al. (2018) menemukan bukti bahwa tidak selamanya peningkatan penerimaan pajak menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara, apabila digunakan untuk mendanai aktivitas atau proyek yang produktif. Namun, apabila penerimaan pajak digunakan untuk mendanai *non-productive expenditures* justru berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuktikan secara empiris dan kuantitatif untuk mengambil kesimpulan secara umum mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta pada periode 1987-2019. Hal ini penting untuk diteliti karena dapat menilai efektivitas reformasi perpajakan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan tersebut. Signifikansi dan kontribusi dari penelitian ini adalah menambah literatur penelitian mengenai penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan memberikan bukti empiris selama periode penelitian. Selain itu, dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi para pembuat kebijakan di bidang perpajakan mengenai keefektifan reformasi perpajakan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, menekankan pentingnya menggunakan penerimaan pajak untuk mendanai aktivitas atau proyek yang produktif sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak Daerah**

Penarikan pajak daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua macam, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara pajak kabupaten meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

### **Otonomi Daerah**

Secara historis otonomi daerah di Indonesia telah mengalami dinamika perubahan beberapa kali menyesuaikan kondisi lingkungan sosial ekonomi dan

politik. Perubahan otonomi daerah tersebut ditandai dengan berbagai perubahan perundangan sejak periode kemerdekaan. Undang-Undang tentang otonomi daerah ini terakhir disusun pada tahun 1999, yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-undang ini kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara prinsip kedua undang-undang tersebut mengubah pola penyelenggaraan pemerintah daerah dan menandai dimulainya Era Otonomi Daerah di Indonesia. Dilaksanakannya otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Melalui pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dalam mengembangkan dan menggali potensi di daerahnya masing-masing sehingga mampu melakukan pembangunan daerah.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya mempunyai pengertian meningkatnya output barang dan jasa pada wilayah tertentu dan biasanya diukur dengan pertumbuhan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk tingkat daerah, PDB disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk selanjutnya digunakan sebagai konsumsi “akhir” masyarakat (BPS, 2021). Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi antara faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Nilai tambah dihitung dengan cara mengurangi nilai produksi (*output*) dengan biaya antara. Komponen-komponen nilai tambah bruto meliputi pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. BPS mengeluarkan dua angka PDRB, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (*adhb*) dan PDRB atas dasar harga konstan (*adhk*). PDRB *adhb* menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB *adhk* menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB *adhk* atau PDRB riil biasanya digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai pengaruh atau dampak penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan. Saragih (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan penerimaan pajak provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Adriansyah (2014) juga menemukan bahwa terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak, tetapi pertumbuhan penerimaan pajak tidak sama dengan pertumbuhan ekonomi. Adkisson dan Mohammed (2014) telah meneliti *tax structure and state economic growth during the Great Recession*, dengan

menggunakan data dari 50 negara pada rentang tahun 2004 hingga 2010. Hasilnya adalah terdapat dukungan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi sekalipun pada masa resesi.

Selanjutnya, Neog & Gaur (2020) dalam penelitian pada 14 negara bagian di India pada periode 1991-2016 menemukan pajak penghasilan dan pajak barang-jasa memiliki dampak negatif, sedangkan pajak transaksi properti dan modal berpengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi di India. Namun sebaliknya, Sihaloho (2020) menemukan di Indonesia pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Sementara Iswahyudi (2018) menemukan pajak konsumsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pajak pendapatan tidak berpengaruh. Gashi et al. (2018) menemukan sebagian besar jenis pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan tingkat yang berbeda-beda. Stoilova (2017) dan Stoilova & Patanov (2012) melakukan penelitian mengenai *tax structure and economic growth* di negara-negara Eropa dan menyimpulkan bahwa pajak atas barang konsumsi, pajak penghasilan, dan pajak atas properti mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jalata (2014) menemukan bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Sementara itu, Ginting et al. (2019) menemukan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Demikian juga penelitian yang dilakukan Nurhemi & Suryani (2015) dan Rustan (2013) juga menemukan otonomi keuangan daerah atau desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara Sasana (2015) menemukan desentralisasi fiskal memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara statistik tidak signifikan.

Dari berbagai hasil penelitian sebelumnya, dapat diperoleh gambaran secara umum, bahwa penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Kesenambungan dalam penerimaan pajak dapat menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi meskipun dalam keadaan resesi.

### **C. METODE PENELITIAN**

Bagian ini menguraikan metode riset dan hipotesis yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada periode 1987-2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan instrumen penelitian berupa data keuangan dalam bentuk nominal. Untuk pengolahan data kuantitatif, peneliti akan menerapkan kaidah dasar dalam statistika dan ekonometrika, yang meliputi statistik deskriptif dan analisis regresi dengan bantuan software SPSS. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017). Untuk mengetahui hubungan antara variabel penerimaan pajak daerah (PJKD) dan nilai riil produk

domestik regional bruto (RPDRB) akan digunakan analisis regresi. Selain itu juga akan ditambahkan satu variabel *dummy* untuk mengetahui dampak pemberlakuan otonomi daerah tahun 2000 pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut Gujarati (2003), analisis regresi merupakan analisis yang mempelajari ketergantungan satu variabel, variabel terikat (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel lain, variabel penjelas (*explanatory variables*). Dalam penelitian ini model regresi yang diajukan adalah:

$$RPDRB_t = \beta_0 + \beta_1 PJKD_t + \beta_2 D_{2000} + u_t \quad (1)$$

dimana  $RPDRB_t$  = PDRB riil DKI Jakarta pata tahun ke-t dan  $PJKD_t$  = penerimaan pajak daerah DKI Jakarta tahun ke-t, sedangkan  $D_{2000}$  adalah variabel *dummy* untuk mempresentasikan pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2000.  $\beta_0$ ,  $\beta_1$  dan  $\beta_2$  adalah parameter yang akan diestimasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah dan pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi atau  $\beta_1$  dan  $\beta_2 > 0$ .

Sementara untuk nilai elastisitas diperoleh dengan rumus:

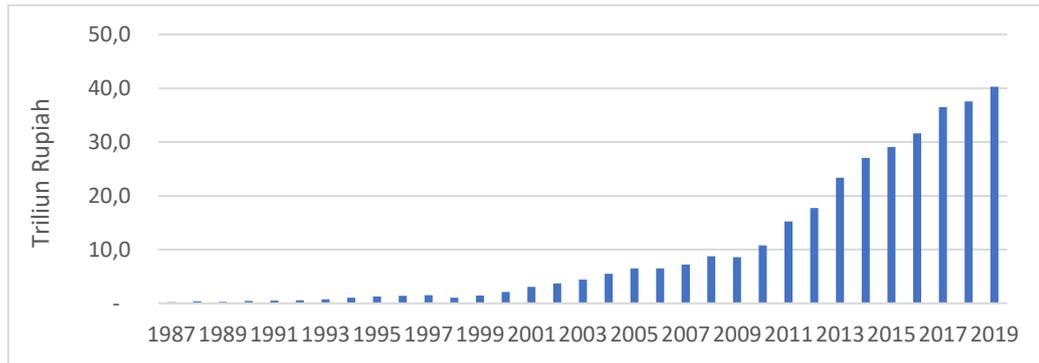
$$\varepsilon = \beta_1 \frac{\text{Rata-rata (PJKD)}}{\text{Rata-rata (RPDRB)}} \quad (2)$$

dimana  $\varepsilon$ =elastisitas

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Perkembangan Penerimaan Pajak DKI Jakarta**

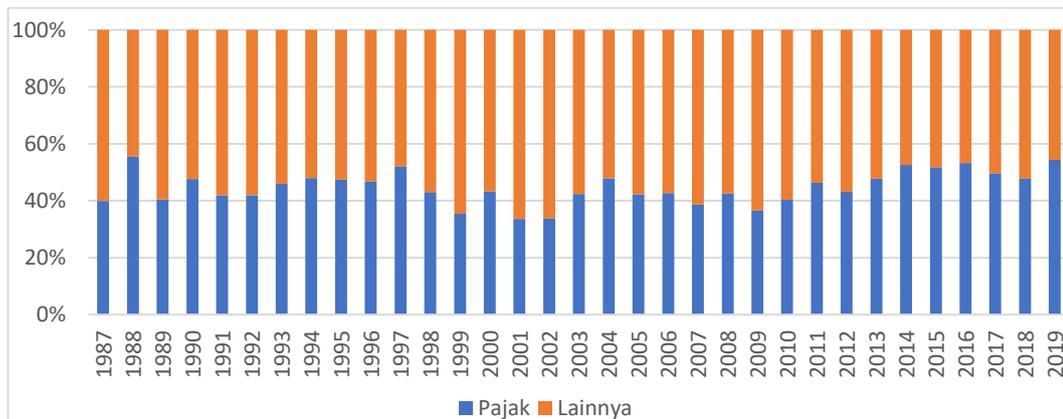
Dibutuhkan dana yang relatif besar untuk membiayai pembangunan suatu daerah. Dana pemerintah daerah yang direpresentasikan oleh besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu ukuran kemampuan daerah dalam membangun daerah termasuk membangun prasarana dan saranaa. Salah satu sumber utama penerimaan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan adalah pajak. Besar kecilnya penerimaan pajak daerah akan menentukan kapasitas keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Pada periode 1987-2019 penerimaan pajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada Gambar 1. Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2000 penerimaan pajak daerah Pemprov DKI Jakarta mengalami kenaikan yang cukup besar, bahkan pada periode 2011-2019 mengalami peningkatan yang cukup tajam. Hal ini sesuai tujuan pelaksanaan otonomi dimana pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam mengembangkan dan menggali potensi daerahnya sehingga mampu melakukan pembangunan daerah.



Sumber: DJPK, beberapa tahun

**Gambar 1.**  
**Perkembangan Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1987-2019**

Dilihat menurut jenis penerimaan, pajak daerah merupakan salah satu sumber utama penerimaan Pemprov DKI Jakarta. Gambar 2 menunjukkan setiap tahun pajak daerah menyumbang sekitar 40-50 persen terhadap total penerimaan Pemprov DKI Jakarta. Pada beberapa tahun terakhir kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan Pemprov DKI Jakarta terus meningkat. Ini menunjukkan peran penting pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di DKI Jakarta.



Sumber: DJPK, beberapa tahun

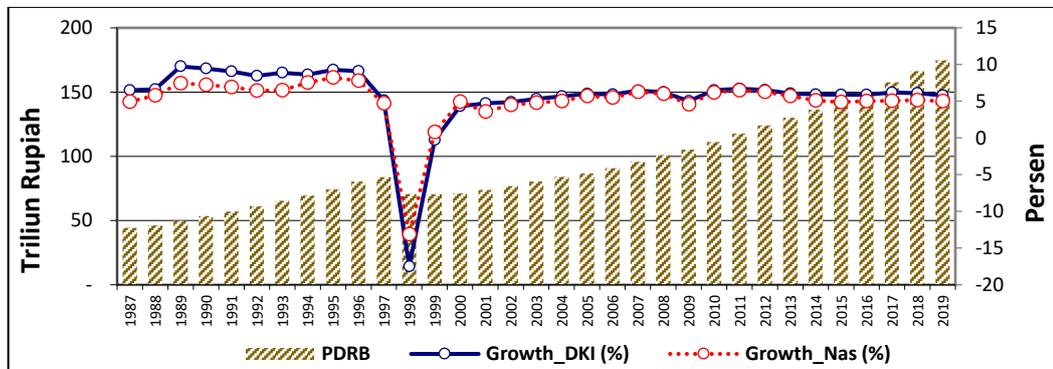
**Gambar 2.**  
**Perkembangan Pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Sumber Penerimaan, 1987-2019**

### Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta

Pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 perekonomian DKI Jakarta yang digambarkan dengan produk domestik regional bruto riil (PDRB adhk) dan angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perubahan tata kelola pemerintahan sejak dimulainya era otonomi daerah pada tahun 2000 juga berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebelum krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan 1997 cukup tinggi antara 6-10 persen. Pada saat

terjadi krisis ekonomi yang puncaknya terjadi pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta terkoreksi cukup dalam yang mencapai minus 17,49 persen. Sementara sejak tahun 2000 pertumbuhan perekonomian di DKI Jakarta relatif stabil di sekitar 5 persen.

Pada Gambar 3 juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta secara umum di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Ini terjadi mengingat DKI Jakarta merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional. Selain sebagai ibukota negara, DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian dan keuangan di Indonesia. Namun demikian, perekonomian di DKI Jakarta rentan terhadap guncangan dari luar. Ini dapat dilihat ketika krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan krisis finansial dunia tahun 2008-2009 pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta langsung terkoreksi. Ini sebagai konsekuensi DKI Jakarta sebagai kota terbuka dan hampir sebagian besar kebutuhan masyarakat DKI Jakarta didatangkan dari daerah lain atau luar negeri.



Sumber: BPS, beberapa tahun

**Gambar 3.**  
**Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta, 1987-2019**

### Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta

Tabel 1 menampilkan nilai statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai rata-rata dari RPDRB dan PJKD menunjukkan angka yang positif dan cukup besar. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta cukup baik, begitu juga dengan penerimaan pajak daerah. Hal tersebut dapat memberikan tanda bahwa pajak daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.

**Tabel 1.**  
**Statistik deskriptif variabel penelitian**

Variabel	Obs	Rata-rata	Std Dev	Minimum	Maximum
RPDRB	33	878.417,46	424.872,40	321.510,5	1.836.198,5
PJKD	33	10.192,15	12.620,18	179,1	40.298,1

Sumber: data diolah dengan SPSS

Tabel 2 menampilkan hasil akhir regresi model penelitian. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat atau tidak. Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai statistik F sebesar 341,054 dengan nilai probabilitas 0,0000. Hasil ini menunjukkan bahwa pada level signifikansi  $\alpha$  5% variabel bebas (PJKD dan  $D_{2000}$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat RPDRB sebagai proksi pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta. Dengan kata lain, pada periode 1987-2019, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dan kebijakan otonomi daerah.

**Tabel 2.**  
**Hasil regresi model penelitian Variabel dependen: RPDRB**

Variabel	Koefisien	Std Dev	Prob.
C	492.565,0	25.015,287	0,000
PJKD	29,124	1,587	0,000
$D_{2000}$	146.874,2	40.366,777	0,001
R <sup>2</sup> -adj = 0,955		F = 341,054 (0,000)	

Sumber: data diolah dengan SPSS

Selanjutnya, nilai *adjusted* R<sup>2</sup> digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Semakin besar nilainya, berarti semakin besar pula variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Berdasarkan Tabel 2, nilai *adjusted* R<sup>2</sup> mencapai 0,955. Hal ini berarti bahwa 95,5% variasi dari pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta (RPDRB) dapat dijelaskan dengan perubahan penerimaan pajak daerah (PJKD) dan  $D_{2000}$ . Sementara sisanya, 4,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi maka dilakukan uji statistik t (*t-test*). Berdasarkan Tabel 2 di atas, pada level signifikansi  $\alpha = 5\%$  variabel penerimaan pajak daerah (PJKD) dan kebijakan otonomi daerah ( $D_{2000}$ ) berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (RPDRB), yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas PJKD ( $0.0000 < 0.05$ ) and  $D_{2000}$  ( $0.0010 < 0.05$ ).

Berdasarkan hasil ini, diperoleh kesimpulan bahwa penerimaan pajak daerah dan kebijakan otonomi daerah memengaruhi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Dengan demikian, hipotesis bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti. Hasil riset ini mendukung hasil riset yang sebelumnya telah dilakukan oleh Sihaloho (2020); Neog & Gaur (2020); Saragih (2018), Iswahyudi (2018); Gashi et al. (2018); Stoilova (2017); Adriansyah (2014); Jalata (2014); dan Adkisson dan Mohammed (2014) yang secara umum menyimpulkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara.

Pengaruh positif penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. Dari sisi proses analisis kebijakan yang mencakup serangkaian aktivitas penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan, dapat disimpulkan

bahwa reformasi perpajakan daerah di DKI Jakarta dinilai efektif karena terbukti terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta.

Sementara ditinjau dari efektivitas reformasi perpajakan daerah, berdasarkan hasil uji empiris dalam penelitian ini maka dapat dikatakan cukup berhasil. Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi ke depannya sangat bergantung pada penggunaan penerimaan pajak untuk tujuan kemakmuran rakyat secara luas. Mdanat et al. (2018) menyatakan bahwa penerimaan pajak yang tinggi tidak selamanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula, tergantung tepat guna atau tidak. Penerimaan pajak yang digunakan untuk mendanai proyek atau kegiatan yang tidak produktif justru tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara Wijayanti dan Babulu (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan efektifitas belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Efektifitas belanja daerah ditentukan oleh prioritas, ketepatan waktu, serta transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dalam membelanjakan anggaran, proses yang transparan dan akuntabel, dan dilaksanakan tepat waktu harus menjadi perhatian agar belanja dapat memacu perekonomian.

Secara empiris besarnya pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai elastisitasnya. Hasil hitung nilai elastisitas pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,34 (lihat Tabel 3). Ini artinya kenaikan pajak daerah sebesar 1% berpotensi menaikkan pertumbuhan ekonomi 0,34%. Hasil ini berarti kenaikan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta tidak sensitif terhadap kenaikan pajak daerah (*inelastic*). Hasil ini bisa dijelaskan bahwa porsi pengeluaran pemerintah terhadap total PDRB DKI Jakarta memang relatif kecil. Berdasar data BPS Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2019 sumbangan konsumsi pemerintah yang sebagian besar sumbernya dari pajak daerah terhadap total PDRB hanya sebesar 12,82%. Sumbangan terbesar terhadap perekonomian DKI Jakarta berasal dari konsumsi rumah tangga (61,03%) dan pembentukan modal tetap bruto (37,30%).

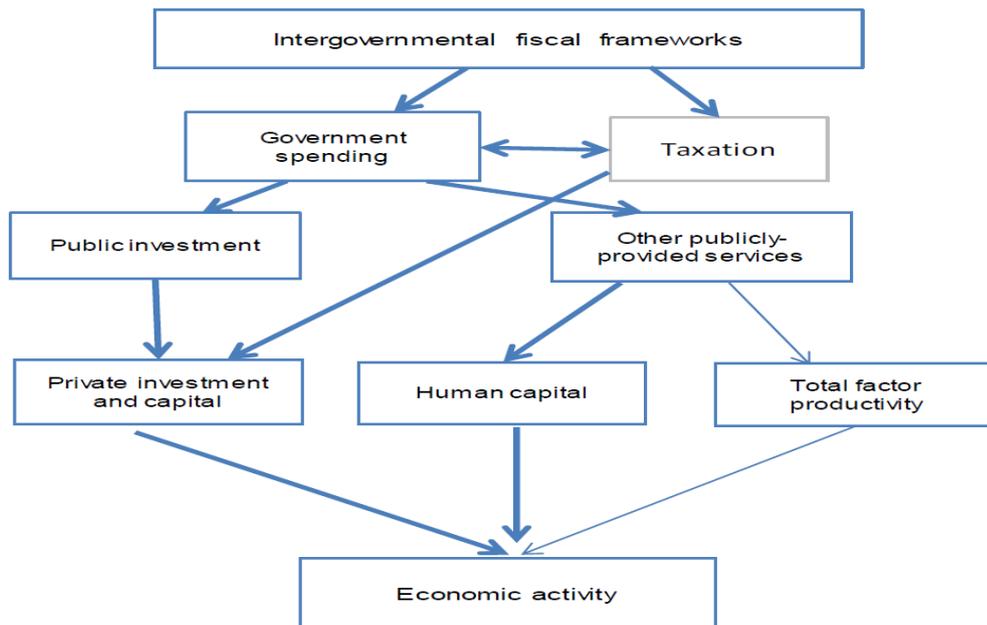
**Tabel 3.**  
**Nilai Elastisitas**

Variabel	Elastisitas
PJKD	0,3379

Sumber: diolah

Selain penerimaan pajak, otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2000 juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ginting et al. (2019), Nurhemi dan Suryani (2015), dan Rustan (2013) juga menemukan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Blochliger and Akgun (2018) dapat dijelaskan pada diagram di bawah ini. Desentralisasi fiskal akan menyediakan dana

bagi pemerintah daerah untuk meningkatkannya. Peningkatan pengeluaran pemerintah daerah akan mendorong peningkatan belanja modal yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Yurianto (2020) yang menemukan rasio belanja barang, jasa dan modal terhadap total belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga Ayu et al. (2020) menemukan alokasi belanja modal mempunyai pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Blochliger and Akgun (2018)

**Gambar 4.**  
**Keterkaitan Desentralisasi Fiskal Dengan Pertumbuhan Ekonomi**

## E. SIMPULAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak ini, tak terkecuali pemerintah daerah melalui berbagai reformasi perpajakan daerah. Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan. Penerimaan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Data pada periode penelitian (1987-2019) menunjukkan penerimaan pajak daerah terus meningkat setiap tahun dan menjadi sumber utama penerimaan Pemprov DKI Jakarta. Begitu juga pertumbuhan ekonomi relatif stabil, kecuali pada periode 1997-1999. Hasil analisis regresi menunjukkan penerimaan pajak daerah dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta selama periode 1987-2019.

Implikasi dari temuan dalam penelitian ini adalah dibutuhkan dukungan kesinambungan penerimaan pajak daerah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Penerimaan pajak daerah sebaiknya juga digunakan untuk mendanai proyek atau aktivitas yang produktif, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemrov DKI Jakarta juga perlu meningkatkan efektivitas reformasi perpajakan daerah. Selain itu, masyarakat sebagai pembayar pajak juga perlu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak karena pada akhirnya manfaatnya akan kembali kepada mereka.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sekaligus sebagai saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini tidak mengidentifikasi lebih rinci mengenai struktur pajak daerah dan memberi perhatian pada jenis pajak yang mempunyai kontribusi tinggi pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menginvestigasi struktur pajak secara lebih rinci dan komprehensif. Tujuannya agar dapat diketahui kontribusi jenis pajak tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, B. G. (2014). Analisis Pertumbuhan PDB, Penerimaan Pajak dan Insentif Pajak Bagi Industri Manufaktur. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 18(1), 69-84.
- Ayu, L. A., Rayahu, S., & Junaidi. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(1), 31-44.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2016-2020. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2021. Produk Domestik Regional Bruto.  
<https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab3>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2021). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Menurut Pengeluaran 2016-2020. Jakarta.
- Blochliker, H., & Akgun, O. (2018). Fiscal Decentralization and Economic Growth. In Kim (Ed.), *Fiscal Decentralization and Inclusive Growth* (p. 262). Paris: OECD Publishing.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. (2021). Data Keuangan Daerah. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- Gashi, B., Asllani, G., & Boqolli, L. (2018). The Effect of Tax Structure in Economic Growth. *International Journal of Economics and Business Administration*, 6(2), 56-67.
- Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 11(2), 152-160.
- Gujarati, D. 2003. *Basic Econometrics*, 4<sup>th</sup> Edition. New York: McGraw-Hill.
- Jalata, D. M. (2014). The role of value added tax on economic growth of Ethiopia. *Science, Technology and Arts Research Journal*, 3(1), 156-161.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
- Mdanat, M. F., Shotar, M., Samawi, G., Mulot, J., Arabiyat, T. S., Alzyadat, M. A. (2018). Tax structure and economic growth in Jordan, 1980-2015. *EuroMed Journal of Business*, 13(1), 102-127.
- Neog, Y. & Gaug, A. K. (2020). Tax Structure and Economic Growth: A Study of Selected Indian States. *Journal of Economic Structure* 9, 38 (2020). <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00215-3>

- Nurhemi dan Suryani, R. G. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(2), 183-205.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Rustan, A. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi, serta Kaitannya Dengan Otonomi Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 9(3), 284-304.
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal SIKAP*, 3(1), 17-27.
- Sasana, H. (2015). Dampak Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Harga di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, 30(1), 1-14.
- Sihaloho, E. D. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan Vektor Autoregressive. *Jurnal Forum Ekonomi*, 22(2), 202-209.
- Simanjuntak, T. H. & Mukhlis, I. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Stoilova, D. (2017). Tax Structure and Economic Growth: Evidence from the European Union. *Contaduría y Administracion*, 62(3), 1041-1057.
- Stoilova, D., & Patonov, N. (2012). An Empirical Evidence for the Impact of Taxation on Economy Growth in the European Union. *Book of Proceedings—Tourism and Management Studies International Conference Algarve 2012* vol.3, University of the Algarve, Portugal.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Wijayanti, M., dan Babulu, N. L. (2019). Determinan Efektivitas Belanja Daerah dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 34-44.
- Yurianto. (2020). Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, Investasi, Kurs, dan Krisis Ekonomi Dalam Perekonomian Jakarta 1987-2017. *Journal of Applied Business and Economics* (JABE), 7(2), 239-260.